

ABSTRAK

PERANAN KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG BEBAS NARKOBA SIDOMULYO KEC.PUNGGUR LAMPUNG TENGAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN NARKOTIKA

Oleh

FRIZAR FIRMANSYAH

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, terutama dengan peredaran yang melibatkan berbagai kelompok, termasuk remaja. Salah satu contoh nyata terdapat di Dusun Sidorahayu, Kampung Sidomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah, di mana anak-anak remaja dilibatkan sebagai kurir narkoba. Kondisi ini menimbulkan keresahan masyarakat, mendorong terbentuknya Kampung Bebas Narkoba sebagai respons komunitas lokal terhadap peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kelompok masyarakat dalam kampung tersebut dalam menanggulangi tindak pidana narkoba serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji asas-asas hukum, teori, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan dengan mengumpulkan data primer dari wawancara dan observasi terhadap aparat penegak hukum serta masyarakat yang terlibat dalam pencegahan narkoba. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami efektivitas hukum dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Frizar Firmansyah

Hasil penelitian kelompok masyarakat kampung bebas narkoba ini memiliki peran dalam upaya pencegahan narkoba, tetapi tidak memiliki kewenangan dalam penindakan atau pemberantasan, karena hal tersebut merupakan amanat yang diberikan kepada lembaga negara. Kelompok Masyarakat kampung bebas narkoba merupakan pendukung dari bagian P4GN yang menjadi kewenangan BNN. Selain itu faktor penghambat peran kelompok masyarakat kampung bebas narkoba terletak pada faktor sarana dan fasilitas lebih tepatnya karena tidak adanya dukungan dana dari pemerintah sehingga program-program kelompok tidak bisa berjalan.

Saran yang dapat penulis berikan pemerintah perlu memberikan dukungan lebih, termasuk alokasi dana khusus, pelatihan berkelanjutan, dan penyediaan fasilitas seperti sekretariat. Penguatan kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Badan Narkotika Nasional (BNN) diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kelompok ini. Selain itu, sosialisasi berbasis digital perlu ditingkatkan guna menjangkau generasi muda yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Dengan strategi ini, kelompok masyarakat diharapkan dapat lebih optimal dan berkelanjutan dalam menjalankan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Kata Kunci: Peranan, Dampak Narkotika, P4GN

ABSTRAC

THE ROLE OF COMMUNITY GROUPS IN KAMPUNG BEBAS NARKOBA SIDOMULYO, PUNGGUR SUBDISTRICT, CENTRAL LAMPUNG, IN THE PREVENTION AND MITIGATION OF NARCOTICS DISTRIBUTION

By

FRIZAR FIRMANSYAH

The abuse of narcotics in Indonesia is increasingly alarming, especially with the involvement of various groups, including adolescents. A concrete example can be found in Dusun Sidorahayu, Kampung Sidomulyo, Punggur Subdistrict, Central Lampung, where young people are involved as narcotic couriers. This situation has caused public unrest, leading to the formation of Kampung Bebas Narkoba as a community-based response to the circulation of narcotics. This research aims to examine the role of the community group in the village in combating narcotic crimes and to identify the barriers they face.

The research methodology employed is a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. The normative juridical approach involves reviewing legal principles, theories, doctrines, and relevant regulations, such as Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Presidential Regulation No. 12 of 2011. The empirical juridical approach is carried out through field studies, collecting primary data through interviews and observations with law enforcement officers and community members involved in narcotics prevention. This study utilizes both primary and secondary data, which are analyzed descriptively to understand the effectiveness of the law in preventing and eradicating narcotics.

Frizar Firmansyah

The research findings indicate that the Drug-Free Village Community Group plays a role in drug prevention efforts but does not have the authority for enforcement or eradication, as these responsibilities are entrusted to state institutions. The Drug-Free Village Community Group serves as a supporting element within the P4GN program, which falls under the jurisdiction of the National Narcotics Agency (BNN). Furthermore, a major obstacle to the group's effectiveness lies in the lack of facilities and infrastructure, primarily due to the absence of government funding, which hampers the implementation of their programs.

The recommendations provided suggest that the government should offer more support, including the allocation of specific funds, continuous training, and the provision of facilities such as offices or secretariats. Strengthening collaboration with law enforcement and the National Narcotics Board (BNN) is crucial to increase the group's effectiveness. Additionally, digital-based socialization should be enhanced to reach younger generations who are vulnerable to narcotics abuse. With this strategy, the community group is expected to be more effective and sustainable in implementing the P4GN program.

Keywords: *Kampung Bebas Narkoba, Barriers, P4GN.*